KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : Kenaikan Tunjangan DPR Akhirnya Cair
**Tanggal** : Kamis, 15 Oktober 2015
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia
**Halaman** : 4

# Kenaikan Tunjangan DPR Akhirnya Cair

**JAKARTA –** Setelah menuai kontroversi beberapa waktu lalu rencana kenaikan tunjangan anggota DPR akhirnya terealisasi.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Dimyati Natakusumah memastikan kenaikan tunjangan untuk pimpinan dan anggota alat kelengkapan (AKD) DPR sudah cair per awal Oktober tahun ini.

"Sudah cair awal Oktober. Karena ini *kan* sudah keputusan, jadi sistem tinggal jalan, langsung masuk ke rekening masing-masing anggota," kata Dimyati di Jakarta kemarin.

Dengan pencairan kenaikan tunjangan tersebut, sekarang ini waktunya bagi anggota DPR untuk menyampaikan sikapnya apakah penolakan yang sebelumnya disampaikan sekadar pencitraan atau memang benar-benar menolak. Menurut Dimyati, kalau memang menolak, BURT siap memfasilitasi setiap anggota yang ingin mengembalikan kenaikan tunjangannya. "Saya nanti akan tanda tangan, isinya ucapan terima kasih. Itu kalau ada yang mengembalikan," ungkapnya.

Seperti diketahui, usulan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR telah disetujui pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Persetujuan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/-MK.02/2015.

Kenaikan yang disetujui meliputi tunjangan kehormatan untuk ketua badan/komisi yakni naik dari Rp4.460.000 menjadi Rp6.690.000, wakil ketua badan/komisi dari Rp4.300.000 naik menjadi Rp6.450.000, dan anggota dari Rp3.720.000 naik menjadi Rp5.580.000.

Kemudian tunjangan komunikasi intensif yakni untuk ketua badan/komisi dari Rp14.140.000 naik menjadi Rp16.468.000, wakil ketua dari Rp14.140.000 naik menjadi Rp16.009.000, dan anggota naik dari Rp14.140.000 menjadi Rp15.554.000.

Untuk tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, ketua badan/komisi tunjangannya naik dari Rp3.500.000 menjadi Rp5.250.000, wakil ketua badan/komisi dari Rp3.000.000 naik menjadi Rp4.500.000, dan anggota dari Rp2.500.000 naik menjadi Rp3.750.000. Selain itu, bantuan langganan listrik dan telepon juga naik dari Rp5.500.000 menjadi Rp7.700.000.

Kenaikan tunjangan ini sempat mendapatkan sorotan negatif publik karena dilakukan saat kondisi perekonomian sedang sulit. Sejumlah anggota DPR bahkan terang-terangan menolak dan berjanji akan mengembalikannya jika jadi dicairkan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menegaskan, fraksinya akan tetap konsisten pada sikapnya yakni menolak kenaikan tunjangan tersebut. "Kalau itu tidak pada tempatnya, kami akan memulangkan. Jangan khawatir," katanya kemarin.

"Fraksi sudah instruksikan ke seluruh anggota untuk mengembalikan tunjangan tersebut," kata Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarief Abdullah Alkadrie.

**rahmat sahid**